

Judul : No viral, no justice bikin respon cepat bantuan hukum
Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

No Viral, No Justice Bikin Respons Cepat Bantuan Hukum

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta setiap kebijakan di kementerian dan lembaga tidak berhenti hanya sampai pada tahap wacana. Sejumlah program perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Willy menilai, sejumlah program dari Kemenkum, Imigrasi, dan LPSK, belum tepat sasaran karena situasi dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Salah satunya, program pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai, program tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini sudah memasuki zaman digital, sehingga posko tidak harus selalu berupa bangunan fisik.

"Posko itu ada di tangan (telepon pintar) kita. Sekarang ada fenomena no viral no justice. Masa bertindak harus berdasarkan viral dulu? Nah, kita bikin kanalnya," tegas Willy dalam kunjungan reses di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), akhir pekan lalu.

Dia juga menyoroti program desa binaan dari imigrasi yang dinilai tidak tepat sasaran, karena wilayah tersebut justru kerap menjadi transit. Perlu diadakan evaluasi, agar pelaksanaan program tidak dipukul rata tanpa mempertimbangkan konteks daerah. Karena, semangatnya bisa saja tetap sama, tapi konteksnya bisa berbeda-beda.

Menurut Willy, komunikasi dengan kementerian maupun pimpinan lembaga sangat penting agar kebijakan yang dijalankan lebih kompatibel. Kepulauan Riau, khususnya Batam, harus menjadi etalase pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemberantasan perdagangan orang, dan narkoba.

Willy menambahkan, standar pelayanan publik di Batam perlu ditingkatkan, karena wilayah itu bersinggungan dengan negara-negara tetangga yang memiliki standar tinggi. Diibaratkan, halaman harus bersih, dan senyuman harus ramah, karena tantangannya adalah negara tetangga. "Ini motivasi kita sama-sama, ayo bersaing dalam konteks pelayanan dengan negara tetangga," katanya.

Anggota Komisi XIII DPR Ahmad Basarah secara khusus menyoroti peran Kanwil Kemenkumham di provinsi itu. Dia menilai, harmonisasi dan sinkronisasi pembentukan hukum antara Pusat dan Daerah jadi poin krusial. Dalam Perpres 139/2024, Kemenkum bertugas memimpin, mengkoordinasikan, urusan pemerintahan di bidang hukum.

"Karena kita menganut negara kesatuan, bukan federalisme, maka pembentukan hukum di Kepri, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dia terintegrasi dengan pembentukan hukum secara nasional," tegas ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri itu. ■ PYB